

BNN GANDENG KEMENDES PDTT

Perangi Narkoba Sampai Desa

JAKARTA (KR) - Badan Narkotika Nasional (BNN) menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk memerangi narkoba.

Hal itu mencuat saat Menteri Desa dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Kepala BNN Petrus Golose membahas Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Program Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba), khususnya di desa-desa, Kamis (18/2).

Kedatangan Kepala BNN itu untuk mengajak Kemendes PDTT untuk memerangi peredaran Narkoba di desa yang mulai mengkhawatirkan. Pasalnya, data terbaru yang diperoleh BNN di lapangan menun-

jukkan ada 983 desa yang masuk kategori Bahaya.

Sejumlah fakta yang diungkap Petrus Golose soal peredaran Narkoba di desa, warga desa juga dimanfaatkan untuk menjadi kurir dengan iming-iming uang dan bahkan mulai melirik desa sebagai lokasi produksi.

Oleh karena itu, BNN mengajak Kemendes sebagai *leading sector* yang mengurus masalah desa untuk bersama-sama turun ke desa. BNN sendiri punya program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) yang memusatkan perhatian di desa-desa. Saat ini, BNN telah menggandeng Kabupaten

Cianjur sebagai pilot percontohan program itu.

Menteri Desa Abdul Halim Iskandar menyambut baik tawaran kolaborasi dari BNN ini. Program Desa Bersinar sejalan dengan salah satu Program Desa Model dari Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan. Program ini juga fokuskan ke kampanye antinarkoba dan perang terhadap zat adiktif itu.

Namun, karena pandemi Covid-19, program ini dialihkan untuk penanganan pandemi agar tidak berkembang di desa. Hal ini terbukti efektif karena angka penyebaran Covid-19 di desa jauh lebih kecil dibanding di desa. "Jika perlu program ini bisa menggunakan Dana Desa. Harus segera disusun regulasi sebagai pedoman," kata Halim Iskandar. (Ati)-f



KR-Surya Adi Lesmana

KELUHAN BUDIDAYA IKAN: Kolam dari terpal dipakai untuk pembibitan oleh Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) Manunggal Roso di Dusun Ngrajun, Banjarharjo, Kalibawang, Kulonprogo, Kamis (18/2). Dampak pandemi Covid-19, pengelola mengeluhkan serapan hasil panen ikan yang menurun drastis sehingga mereka kesulitan menjualnya.

KAPOLSEK KONSUMSI NARKOBA Kompol Yuni Terancam Dipidanakan

BANDUNG (KR) - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri menyebut Kapolsek Astanaanyar Kompol YP (Yuni Purwati Kusuma Dewi) yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba terancam dipidanakan dan dipecat dari Korps Bhayangkara itu.

"Iya jelas, jadi ada dua pilihannya tadi, dipecat atau dipidanakan. Jadi sangat jelas sekali tindakan kita terhadap anggota kita yang melakukan pelanggaran, Ya bisa dua-duanya, tergantung kesalahannya nanti, kita lihat ya," kata Ahmad Dofiri di Polrestaes Bandung, Kota Bandung, Kamis (18/2).

Menurutnya hal tersebut diterapkan sebagai wujud keseriusannya dalam menindak siapapun anggotanya yang melakukan pelanggaran, termasuk polisi wanita berpangkat perwira menengah tersebut.

Kini, kata dia, Kompol YP pun telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Astanaanyar. Polrestaes Bandung pun tengah menyiapkan perwira lainnya untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Selain itu, belasan anggota Polsek Astanaanyar yang diduga terlibat narkoba itu pun terancam mendapat sanksi yang serupa dengan Kompol YP. Kini 12 anggota yang diciduk itu masih diamankan Propam Polda Jawa Barat.

Menurutnya kasus ini dapat menjadi pembelajaran anggota polisi yang lainnya agar tidak terjerumus mengonsumsi barang-barang terlarang tersebut. (Ant)-f

KPK TERUS DALAMI KASUS MANDALA KRIDA Tak Buru-buru Tetapkan Tersangka

YOGYA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mendalami dugaan kasus korupsi pembangunan renovasi Stadion Mandala Krida tahun anggaran (TA) 2016-2017 di Pemda DIY.

KPK tidak ingin buru-buru mengumumkan status tersangka terlalu dini. Pasalnya upaya itu melanggar prinsip keadilan. Sehingga pengumuman tersangka akan dilakukan setelah penyidik mengumpulkan semua bukti-bukti kuat.

"Kalau untuk perkembangan kasusnya sampai sekarang masih didalami. Nanti kita lihat sejauh mana pembangunan itu dilakukan. Kita sudah lihat ada dugaan penyimpangan terkait dengan harganya dan kualitas bangunan. Memang ditemui adanya penyimpangan dalam proyek renovasi tersebut. Yang disoroti adalah dugaan mark up atau peningkatan harga yang telah ditambahkan pada biaya dari sebuah produk," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Kepatihan, Kamis (18/2).

Alexander Marwata mengatakan, apabila nanti KPK sudah mengumpulkan semua bukti-bukti yang diperlukan dan di-

rasa sudah lengkap akan diumumkan tersangkanya. Mengingat saat ini KPK tidak akan mengumumkan setiap ada penetapan tersangka dugaan kasus korupsi. Hal ini untuk menghindari agar seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka akan lama dalam menjalani proses hukumnya. Sebab penetapan tersangka tersebut akan membuat seseorang menjadi 'tersandera'. Tidak hanya itu keluarga dari yang bersangkutan juga akan merasakan dampaknya, karena dimana-mana sudah dicap keluarga koruptor.

Plt Jubir KPK Ali Fikri di Jakarta mengemukakan, pihaknya telah melakukan pengeledahan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida Kota Yogyakarta. Dalam pengeledahan yang berlangsung Rabu (17/2) KPK telah mengamankan berbagai dokumen. Pengeledahan dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY dan Badan Pemuda dan Olahraga Daerah DIY. (Ria/Ful)-f

BI Turunkan Tingkat Suku Bunga

JAKARTA (KR) - Bank Indonesia (BI) menurunkan tingkat suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin dari 3,75 persen menjadi 3,50 persen. Begitu juga suku bunga Deposit Facility turun 25 basis poin dari 3 persen menjadi sebesar 2,75 persen serta dan suku bunga Lending Facility juga turun 25 basis poin dari 4,5 persen menjadi sebesar 4,25 persen.

"Penurunan tingkat suku bunga ini menjadi tingkat suku bunga terendah sejak tahun 2013. Namun, penurunan suku bunga ke depan makin terbatas," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Kamis (18/2).

Dijelaskan Perry, keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas nilai tukar Rupiah yang terjaga serta sebagai langkah lanjutan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional.

Selain itu, BI juga menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi antara lain, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif. (Lmg)-f

Bank BPD DIY Syariah Wujudkan Eco System Digital



BANK BPD DIY Syariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BPD DIY terus mempertahankan komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan menawarkan berbagai keunggulan tersendiri menapak usia yang ke 14 tahun. Hal tersebut membuat banyak nasabah dan mitra dari berbagai elemen menaruh kepercayaan kepada Bank BPD DIY Syariah sebagai pilihan tepat melakukan berbagai kerjasama. Terlebih Bank BPD DIY Syariah senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dengan menghadirkan berbagai layanan digital guna semakin memudahkan akses layanan transaksi keuangan.

Memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah dan memajukan perekonomian daerah, Bank BPD DIY yang awalnya berdiri di Jalan Cik Ditiro 34 Yogyakarta pada 19 Februari 2007 kini telah berkembang pesat. Dengan perkembangan skala usaha dan meningkatnya layanan kepada nasabah, Bank BPD DIY Syariah kini berkantor di Jalan Magelang Km 5,5 Sinduadi Sleman. Bank

kredit atau Outstanding Financing (OSF) Rp 812 miliar, Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp 624 miliar dan berhasil mencetak laba Rp 44 miliar per Desember 2020.

"Capaian kinerja keuangan tersebut merupakan sebuah kebanggaan tersendiri karena masyarakat DIY yang plural telah memanfaatkan kehadiran Bank BPD DIY Syariah. Atas nama direksi dan manajemen Bank BPD DIY Syariah, kami mengucapkan terima kasih kepada nasabah dan mitra khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memberikan kepercayaan kepada kami mudah-mudahan akan lebih baik lagi kedepan," ujarnya.

Santoso menyampaikan Bank BPD DIY Syariah telah menghadirkan teknologi informasi sebagai dasar dari transaksi digital untuk mempermudah transaksi nasabah sesuai perkembangan zaman. Sejumlah layanan digital tersebut diantaranya mobile banking, Cash Management System (CMS) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Ultimate Automated Transaction (QUAT) yang bisa diakses dari berbagai kanal sehingga batasan jarak dan wilayah tidak banyak persoalan.

"Peningkatan pemakaian mobile banking naik 4581 pemakai menjadi 65.040 pemakai di DIY per



KR-Fira Nurfiani

Salah satu lembaga pendidikan yang menggunakan CMS Bank BPD DIY Syariah.

Bank 2020, The Most Efficient Sharia Business Unit Commercial Bank 2020 dann Mitra BPS-BPIH Program Haji Muda Terbaik 2020.

Bank BPD DIY Syariah kembali dipercaya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai perbankan syariah penerima setoran biaya penyelenggaraan dan perjalanan haji, program haji muda, pengelola dana manfaat serta bank penempatan portofolio investasi untuk disalurkan kepada masyarakat. Sesuai dengan roadmap Bank BPD DIY, pihaknya berencana akan melakukan pemisahan atau spin off dari UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) pada 2023 mendatang sesuai dengan amanat Undang-Undang.

"Bank BPD DIY Syariah telah mengucurkan berbagai pembiayaan yang besar seperti RS, hotel dan sebagainya. Jika memisahkan diri sebagai BUS maka modalnya harus dipisahkan pula, setidaknya kita sudah siap persyaratannya menjadi BUS baik dari segi modal sampai 2024. Kita masih optimis menjadi BUS andaikata UU tersebut diterapkan," terangnya.

Terobosan dan inovasi Bank BPD DIY Syariah antara lain memfasilitasi pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) pada rumah-rumah ibadah, panti asuhan dan sebagainya menggunakan barcode maupun transfer yang dapat dilakukan dengan mobile

banking. Pihaknya akan bekerjasama dengan Dewan Masjid, Rumah Zakat, panti asuhan dan sebagainya. Bank BPD DIY Syariah terus meningkatkan inklusi keuangan yang menasar sekolah di bawah Kementerian Agama, termasuk pemberdayaan pondok pesantren (Ponpes) karena menjadi basis pengembangan ekonomi melalui perbankan syariah." Kami berharap produk dan layanan unggulan khusus yang membuat masyarakat memilih ke perbankan syariah, tidak terkecuali UMKM, industri kuliner halal dan sebagainya," tambah Santoso.

Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Dr Muchlas Arkanuddin MT menuturkan transformasi digital bukan hanya tentang disrupti atau teknologi semata, tetapi menyakut nilai, manusia, optimalisasi dan kemampuan beradaptasi dengan cepat saat diperlukan melalui penggunaan teknologi dan informasi yang tepat. Masyarakat dapat memilih menjadi digital resister, digital explorer, digital player, digital transformer dan digital disruptor.

"Jika mengambil peran minimal sebagai digital transformer atau bisa menjadi digital disruptor maka bisa membangun sebuah bisnis dimana pelanggan semakin memperoleh pengalaman baru dalam melakukan komunikasi dengan lembaga yang diselenggarakan,"

katanya.

Muchlas mengungkapkan pengalaman baru tersebut tentu memberikan kemudahan dalam melaksanakan berbagai macam transaksi yang dilakukan sehingga jika melakukan transformasi digital dengan tepat maka semuanya akan bisa menjadi mudah. Semisal Bank BPD DIY Syariah selaku penyelenggara perbankan UUS semakin mudah melakukan pengaturan lembaga dan pelanggan bisa memperoleh kemudahan dalam melakukan transaksi yang diperlukan.

"Kondisi pandemi ini telah memaksa takmir masjid harus cerdas memanfaatkan temuan teknologi dalam pengelolaan masjid. Takmir perlu melakukan inovasi program digital dan kolaborasi dengan stakeholder masjid. Diantaranya adalah inovasi digitalisasi keuangan masjid dengan bank syariah yang ada di DIY melalui Bank BPD DIY Syariah yaitu QUAT dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). Jadi sumber penerimaan dana masjid selain infak dan shadaqah dapat berasal dari dana wakaf uang apabila masjid telah menjadi nazhir wakaf uang," terang Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Wilayah DIY Prof Dr Muhamad MAG CIRBCom.

Prof Muhamad menuturkan tidak kurang dari 7.000 masjid ada di DIY, namun sayangnya mayoritas



keberadaan masjid tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Seperti kebijakan pembatasan yang diberlakukan di DIY telah berdampak pada ditutupnya sebagian masjid dan berkurangnya masyarakat beribadah di masjid. Kondisi ini berdampak pada menurunnya jumlah penerimaan masjid dari para jamaah dan donatur temporer. "Dalam kondisi seperti ini perlu kecerdasan pengurus masjid melakukan inovasi dan memanfaatkan teknologi. Salah satunya memanfaatkan teknologi digital dalam menjangkau dana infak, shadaqah atau donasi lain dari masyarakat melalui Bank BPD DIY Syariah," imbuh Pembina Nazhir Wakaf Uang DMI DIY ini.

Pengusaha sekaligus mantan Walikota Yogyakarta Herry Zudianto menegaskan perubahan merupakan suatu keniscayaan dan tidak bisa dihindari. Untuk itu, pelaku UMKM harus siap akan perubahan tersebut dan tetap optimis serta inovatif dan kreatif terutama aspek digitalisasi. Pandemi Covid-19 ini justru merupakan puncak dari perubahan khususnya teknologi.

"Pandemi menjadikan pemanfaatan teknologi luar biasa sehingga terjadi akselerasi digitalisasi pada semua aspek. Tidak terkecuali dunia usaha, kita mau tidak mau harus beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan teknologi tersebut," jelas Mantan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) DIY ini.

Ketua Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Hipmikindo) DIY M Faisol mengakui kondisi pelaku UMKM di DIY mengalami tekanan yang sangat signifikan akibat pandemi Covid-19 yang belum kunjung berakhir. Pelaku UMKM di DIY tersebut ada yang mampu bertahan, namun banyak pula yang akhirnya tidak mampu bertahan alias gulung tikar.

"Ada tiga hal yang perlu diperhatikan pelaku UMKM yaitu strategi pemasaran, pengelolaan keuangan dan branding produk. Ketiga hal tersebut harus benar-benar dipikirkan pelaku UMKM di DIY agar mampu bertahan menghadapi kondisi perekonomian yang masih tidak menentu di tengah pandemi Covid-19 saat ini," pungkasnya. (Ira)



KR-Fira Nurfiani

Salah satu UMKM Kuliner yang menjadi merchant QUAT Bank BPD DIY Syariah.

BPD DIY Syariah telah memiliki 1 Kantor Cabang Syariah, 6 Kantor Cabang Syariah, 6 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 3 Kantor Kas Syariah dan 1 Kantor Payment Point yang tersebar di wilayah DIY.

Direktur Utama PT Bank BPD DIY Drs Santoso Rohmad MM mengatakan Bank BPD DIY Syariah telah berhasil berkembang dengan baik dan mantap pada usia 14 tahun ini. Keberhasilan tersebut terlihat dari kinerja keuangannya yaitu Aset mencapai 1,38 triliun, penyaluran

Januari 2021 ini dan akan terus di-genjot agar tetap menjadi kepercayaan masyarakat. Jumlah transaksi digital mencapai 125.592 transaksi dengan jumlah merchant mencapai 3961-an merchant," katanya.

Kiprah Bank BPD DIY Syariah telah menorehkan berbagai prestasi yang membanggakan diantaranya penghargaan dari majalah Investor sebagai Bank Syariah Terbaik 2020 kategori modal di bawah Rp 2 triliun, The Best Asset Quality Sharia Business Unit Commercial